

Peran Operasi Militer Dalam Mendukung Upaya Diplomasi dalam Pembebasan Irian Barat

Role Of Military Operations In Supporting Diplomacy Efforts In The Liberation Of West Irian

Bobby Adhityo Rizaldi^{1*}, Jamadin F. Sianipar² & Syaiful Anwar³

1) Anggota DPR RI Komisi I

2) Dirbinrenproggar Pusat Perhubungan TNI AD

1,2, 3) Program Doktorat Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

Diterima: 27 Maret 2023; Direview: 23 April 2023; Disetujui: 07 Mei 2023

*Corresponding Email: bobbyadhityor@gmail.com

Abstrak

Perebutan kembali wilayah Irian Barat oleh dari jajahan belanda merupakan perjuangan yang sangat melelahkan dan berat. Belanda memiliki niat terselubung untuk memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia. Pemerintah Belanda melanggar kesepakatan Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Linggar Jati, dan Hukum Internasional. Pihak Indonesia telah melaksanakan operasi militer Gurita, Rajawali, Djatayu, dan puncaknya operasi militer Djayawidjaya dalam merebut kembali Irian Barat. Tujuan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan analisis terkait sikap serta strategi dari kedua pihak dalam konflik Irian Barat dari aspek strategi politik/diplomasi, militer, dan ekonomi. Metode penulisan menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menganalisa fakta-fakta yang terjadi pada perjuangan merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda, didukung dengan studi kepustakaan, literatur, jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional, teoritis dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan dan kerjasama antara kegiatan-kegiatan dibidang politik/diplomasi dengan bidang militer, karena pada hakikatnya kedua bidang tersebut memiliki satu tujuan yang sama dan saling membantu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka politik/diplomasi perlu didukung dengan kekuatan militer, begitu sebaliknya kekuatan militer membutuhkan dukungan politik/ diplomasi untuk meminta biaya yang besar dalam memenangkan tujuan perang. Strategi perang di masa depan tidak hanya mengandalkan politik/diplomasi dan peran militer saja, akan tetapi harus melibatkan seluruh komponen pertahanan negara lainnya dan dilaksanakan secara semesta.

Kata Kunci: Hubungan; Kerjasama; Politik/Diplomasi; Militer.

Abstract

The reconquest of West Irian by the Dutch colonialists was a very tiring and hard struggle. The Dutch had a hidden intention to separate West Irian from Indonesian territory. The Dutch government violated the agreements of the Round Table Conference, the Teak Circle Agreement, and International Law. The Indonesian side carried out military operations on Gurita, Rajawali, Djatayu, and finally the Djayawidjaya military operation to retake West Irian. The purpose of this research is to provide an overview and analysis regarding the attitudes and strategies of the two parties in the West Irian conflict from the aspects of political/diplomatic, military and economic strategy. The writing method uses descriptive analysis method, by analyzing the facts that occurred in the struggle to seize West Irian from Dutch rule, supported by literature studies, literature, national and international scientific journals, theoretical and juridical. The results of the research show that there is a relationship and cooperation between activities in the field of politics/diplomacy and the military sector, because in essence the two fields have the same goal and help each other. To get maximum results, politics/diplomacy needs to be supported by military force, and vice versa military power needs political/diplomatic support to ask for huge costs in winning war goals. The war strategy in the future does not only rely on politics/diplomacy and the role of the military alone, but must involve all other components of national defense and be implemented in its entirety.

Keywords: Connection; Cooperation; Politics/Diplomacy; Military.

How to Cite: Rizaldi. B. A., Sianipar. J. F., Anwar. S. (2023). Peran Operasi Militer Dalam Mendukung Upaya Diplomasi dalam Pembebasan Irian Barat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2848-2858

PENDAHULUAN

Perebutan Irian Barat antara Indonesia melawan Belanda dimulai secara resmi pada akhir tahun 1949, dimana pada masa itu justru sedang dilakukan upaya untuk mencari jalan keluar melalui mekanisme perundingan dalam menyelesaikan sengketa politik antara pihak Belanda dan Indonesia melalui perantara organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Woodman C, 2022). Semenjak proklamasi 1945, perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan telah melalui pasang surut gelombang yang cukup panjang untuk mendapatkan simpati dunia internasional sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas disampaikan tekad bulat hati bangsa Indonesia yang menyatakan "Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dapat diartikan secara jelas seluruh tumpah darah Indonesia adalah bahwa Irian Barat merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia tanpa adanya pengecualian (Bone, 1952), namun pihak Belanda saat itu memiliki pemikiran lain dengan memberikan label tersendiri kepada Irian Barat bahwa terpisah dari wilayah bekas jajahan Hindia Belanda lainnya.

Tahun 1949 pada tanggal 23 Agustus, PBB secara khusus membentuk suatu komisi untuk Indonesia diberi nama United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang telah melakukan perundingan antara kedua pihak di kota Den Haag, Belanda (Nadjamuddin, Akbar, Perkasa, Wargadalem, & Lumangino, 2022). Sebutan perundingan itu terkenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB), dengan kesepakatan yang dicapai pihak Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara penuh tanpa ada syarat apapun dan tidak dapat dicabut kembali dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, serta Belanda harus mengakui adanya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Delegasi Indonesia baik dari Republik ataupun Federasi menyampaikan suatu tekad yang sama bahwa wilayah Irian Barat sebagai bagian integral wilayah Indonesia yang tidak terpisahkan (Rosyidin, Dir, & Wahyudi, 2022).

Perjanjian Linggar Jati disepakati sebagai suatu perjanjian untuk mengatasi sengketa antara pihak Belanda dan Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 15 November 1946. Saat itu pemerintah Belanda sudah terlihat gelagat yang mencurigakan dengan menjajaki berbagai kemungkinan untuk menguasai wilayah Irian Barat terlepas dari wilayah Indonesia (Purwanta, 2017). Pada tanggal 10 Desember 1946, Menteri Jonkmann menyampaikan sikap pemerintah Belanda kepada seluruh anggota parlemen Belanda untuk memasukan klausul tambahan dalam pasal 3 dan 4 perjanjian Linggar Jati tersebut. Pemerintah Belanda memasukan "West New Guinea" masuk kedalam kedudukan susunan baru dan tersendiri dalam Kerajaan Belanda, serta menjajaki kemungkinan pemindahan secara besar-besaran orang Belanda yang berada di Indonesia untuk pindah ke wilayah Irian Barat. Secara jelas disampaikan gagasan kolonisasi atau sebagai tempat penampungan khusus bagi orang-orang Belanda berasal dari wilayah Indonesia untuk menetap dan membina pemerintahan sendiri secara merdeka dan berdaulat.

Pada tanggal 6 Februari 1947, berbagai alasan dan niat terselubung pemerintahan Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia terungkap juga ketika Belanda membentuk *South Pacific Commission* dan memasukan Irian Barat dalam persetujuan tersebut. Organisasi yang berada di Noumea tersebut, memiliki anggota negara-negara yang banyak berhubungan dengan wilayah yang belum memiliki pemerintahannya sendiri (*non self governing territories*) di wilayah Samudera Pasifik (Prinsen, Lafoy, & Migozzi, 2017). Pemerintah Belanda berusaha dengan keras untuk tetap menguasai dan memisahkan Irian Barat dari Indonesia, sejak saat itu juga pihak Belanda mulai melancarkan aksi propagandanya dengan meyakinkan dunia Internasional, bahwa Irian Barat memiliki penduduk yang sangat terbelakang, tingkat kebudayaan rendah, dan tidak memiliki pemerintahannya sendiri. Sehingga untuk menentukan bentuk strategi dan operasi militer kedepannya diperlukan berbagai perspektif yang dapat diambil dari timeline operasi sebelumnya.

Peneliti Menurut (Asmoro, Zuhdi, & Widodo Putro, 2022) menguraikan berdasarkan perspektif *history* masa Demokrasi Terpimpin, operasi militer dilakukan dalam rangka perebutan



Irian Barat dan konfrontasi Malaysia. Implementasi pertahanan direduksi menjadi strategi yang pada akhirnya akan diimplementasikan ke dalam operasi militer. Oleh sebab itu dalam menjalankan operasi dan strategi berlandaskan doktrin pertahanan bersifat ofensif atau defensive. Sedangkan menurut (Rosyidin et al., 2022) Operasi militer trikora (1961) diintervensi oleh PBB yang memediasi kedua belah pihak untuk menyepakati konvensi New York 1962 tentang penyerahan kedaulatan Papua kepada pemerintah Indonesia melalui badan administratif ad-hoc PBB, *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) dan mengadakan referendum publik yang dikenal sebagai Undang-Undang Bebas. Pilihan atau Pendapat Rakyat (Pepera) bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib, kepentingan dan masa depannya sendiri secara mandiri. Sedangkan Menurut (Viartasiwi, 2018) Perspektif politik pembentukan narasi sejarah untuk melegitimasi klaim dan menunjukkan bahwa Indonesia mendapat dukungan lebih besar daripada orang Papua. Demokrasi telah memungkinkan pihak-pihak yang lebih lemah untuk memberikan suara atas kehendak mereka. Tak kalah pentingnya bagi para pemerhati jeli Papua Barat, kini terlihat bahwa pemahaman tentang konflik Papua Barat yang berakar pada sejarahnya juga menjadi gesekan tersendiri karena variasi penjelasan sejarah tersebut. Pada akhirnya, titik awal untuk mempelajari konflik Papua Barat dapat ditentukan oleh versi sejarah mana yang diterima. Sehingga diperlukan berbagai perspektif tinjauan dalam menentukan sikap dan strategi pertahanan Indonesia kedepannya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap dan strategi dari Belanda dan Indonesia, serta memberikan analisis terhadap kekuatan militer yang telah dikerahkan bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda dalam usaha-usaha merebut kembali Irian Barat.

METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ilmiah di penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat para generasi muda untuk lebih mencintai tanah air Indonesia, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam diri pribadi masing-masing dari wilayah Sabang sampai Merauke. Serta memberikan gambaran dan analisis terkait dengan sikap pihak Belanda dan Indonesia, strategi yang diambil kedua belah pihak dalam konflik Irian Barat ditinjau dari strategi politik/diplomasi, strategi militer, dan strategi ekonomi.

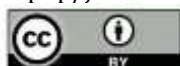
Metode penulisan penelitian jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif (Lambert & Lambert, 2012) dengan menganalisa dari fakta-fakta yang terjadi pada perjuangan merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda, yang didukung dengan studi kepustakaan, literatur, jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, anekdot, dokumen relevan, teoritis, dan yuridis, serta dikaitkan juga dengan beberapa teori yang mendukung dalam penulisan dan analisa jurnal tersebut (Idris, Thamrin, Yoegiantoro, & Triprasetyo, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kejadian

Usaha untuk merebut kembali wilayah Irian Barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia dari pihak Belanda mengalami perjuangan yang sangat panjang, berat dan cukup melelahkan, dengan mempertaruhkan harga diri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia di dunia Internasional. Berbagai upaya diplomasi dan perundingan-perundingan tentang dilakukan tentang penyerahan Irian Barat dari pihak Belanda ke Indonesia, namun tidak membuahkan hasil baik dan terkesan terbentur dengan jalan buntu/deadlock (Djamhari, 1995). Para wakil delegasi Indonesia, terkait dengan masalah wilayah Irian Barat sudah berupaya cukup keras berdiplomasi di depan Sidang Umum PBB berkedudukan di New York, namun menghasilkan tidak adanya perubahan sikap dari pemerintahan Belanda dan tidak bergeming sedikitpun. Sikap yang ditunjukkan pemerintah Belanda di dunia Internasional telah mencederai dan melukai martabat bangsa dan rakyat Indonesia, yang pada dasarnya bangsa Indonesia telah berdaulat dan merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Pemerintah Belanda sudah melanggar hasil kesepakatan dan keputusan yang tertuang di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), Perjanjian Linggar Jati, dan Hukum Internasional. Belanda secara terang-terangan menginjak harga diri bangsa Indonesia dan menyakiti seluruh rakyat



Indonesia, secara terbuka dan didukung keputusan anggota parlemennya secara resmi telah memasukkan Irian Barat masuk kedalam Kerajaan Belanda yang di deklarasikan pada pertengahan bulan Agustus 1952. Belanda juga melakukan aksi dan tindakan penguatan diri di wilayah Irian Barat dengan merubah konstitusinya tanpa berunding dengan pemerintah Indonesia. Tindakan penguatan diri yang dilakukan pemerintah Belanda masuk dalam bidang politik/diplomasi, aksi militer, dan peningkatan ekonomi yang semata-mata hanya ingin Irian Barat dapat dipisahkan dengan wilayah Indoensia lainnya. Belanda selalu meminta syarat-syarat yang memberatkan dan tidak jelas, berdalih dan beralasan tidak jelas juga, sehingga membuktikan bahwa perundingan dengan pemerintah Belanda tidak ada gunanya dan tidak bisa dengan menggunakan cara damai. Tidak ada keinginan Belanda untuk mengakui dan menyinggung kedaulatan wilayah Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah Belanda tidak menghargai bangsa Indonesia, oleh karena itu Pemerintahan Indonesia diwakili Kabinet Ali II pada tahun 1956 mengambil sikap tegas dengan kebulatan tekad membubarkan serta tidak mengakui apa yang sudah diputuskan dalam perjanjian KMB (Cholil, 1971). Berdasarkan aksi dan tindakan tersebut telah membawa perubahan besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia saat itu, tuntutan dan perjuangan pemerintah Indonesia kembali berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan konstitusi Negara Republik Indonesia telah memplokamirkan dengan lantang bahwa wilayah Irian Barat, dari Sabang sampai Merauke merupakan wilayah dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Secara politis dan yuridis, kedua dasar pokok tersebut mengilhami bangsa Indonesia untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari pemerintahan kolonial Kerajaan Belanda. Penyelesaian ini harus diselesaikan internal bangsa dan rakyat Indonesia tanpa melibatkan organisasi internasional PBB, itulah yang menjadi perjuangan inti selanjutnya. Sejak saat itu Presiden Soekarno selaku pemimpin tertinggi Republik Indonesia, merubah cara perjuangan melalui Komando Rakyat. Menurut Ridhani (2009), perjuangan bangsa Indoensia dalam merebut kembali wilayah Irian Barat dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang disahkan pada tanggal 19 Desember 1961:

1. Gagalkanlah pembentukan Negara Boneka Irian Barat, buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.



Gambar 1. Dokumentasi Rapat Trikora, Desember 1961
Sumber: (Kementerian Penerangan, 1961)

Indonesia telah memulai perjuangan babak baru dalam merebut wilayah Irian Barat. Tanggal 15 Januari 1962, pertempuran Laut Aru yang dikomandoi Komodor Yos Soedarso sangat begitu heroik telah memicu semangat seluruh rakyat Indonesia. Darah yang mendidih, semangat yang meluap-luap, berkorbar-kobar dan menggelora menginspirasi seluruh golongan rakyat untuk mendesak pemerintah Indonesia agar menyerang Belanda dengan cara frontal dan tidak lagi menggunakan cara damai. Sejak bulan Mei 1961, pasukan militer Indonesia dan sukarelawan telah

mendarat dan mulai pertempuran melawan militer Belanda dalam upaya merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi yang kita cintai Indonesia. Rasa lelah dan letih dapat dikalahkan oleh semangat dan kekuatan rakyat Indonesia, perjuangan ini benar-benar nyata dan yakin ketika mendapatkan dukungan penuh dari perjuangan putra putri Irian Barat sendiri. Pertempuran ini telah mengorbankan ratusan nyawa pasukan militer dan rakyat Indonesia yang telah gugur di medan perang sebagai pahlawan syuhada dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI, namun hal ini tidak mensurutkan tekad dan kejuangan rakyat Indonesia bertempur melawan Belanda yang memiliki peralatan militer lebih canggih. Akhir dari perjuangan rakyat Indonesia telah membuahkan hasil sangat baik, berdasarkan perjanjian New York pemerintah Belanda sejak 1 Oktober tidak lagi berkuasa atas wilayah Irian Barat, dan rakyat Indonesia dapat kembali masuk ke wilayah Irian Barat secara berangsur-angsur. Tanggal 1 Mei 1963, Belanda secara keseluruhan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sesuai dengan isi perjanjian New York yang telah disepakati (Departemen Penerangan RI, 1966).

Pernyataan Sikap Belanda

1. Memiliki sikap pendirian yang tidak tetap: pemerintah Belanda sangat ingin memisahkan wilayah Irian Barat dari NKRI, akan tetapi ditemukan beberapa fakta-fakta yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan Undang Undang Belanda yang disahkan pada tahun 1948 menyebutkan bahwa Irian Barat masuk dalam wilayah bangsa Indonesia. Wilayah Nederland, Indonesia, Suriname dan Antilen Belanda masuk dalam Kerajaan Belanda. Secara eksplisit pemerintah Belanda aslinya mengakui Irian Barat masuk dalam Indonesia, karena dalam Undang Undang tersebut tidak menyebutkan Irian Barat dalam urutan tersebut.
2. Para wakil delegasi Belanda di dunia internasional terutama pada Konferensi Meja Bundar memiliki pendapat bahwa Irian Barat harus diberikan status yang khusus karena tidak ditemukan adanya hubungan secara etnologis, religis, sosiologi dengan wilayah Indoensia lainnya. Irian Barat merupakan wilayah yang masih terbelakang, tidak terdapat hubungan esensial dengan Indoensia, oleh karena itu wilayah Irian Barat sesuai dengan perintah dalam Piagam BBB harus berada diluar NKRI dan memiliki hubungan khusus dengan Kerajaan Belanda.

Pernyataan Sikap Indonesia

1. Indonesia bersikap konsisten bahwa wilayah Irian Barat masuk sebagai satu bagian yang terintegrasi dengan wilayah Republik Indonesia Serikat (bentuk negara Indonesia saat itu) sebagai mana ditetapkan dalam persetujuan Linggar Jati maupun Renville yang menyatakan, bahwa akan menyerahkan kedaulatan penuh terhadap wilayah Hindia Belanda.
2. Irian Barat sekian lama memiliki dan terjalin hubungan-hubungan secara etnologis, religius, peningkatan ekonomi dengan berbagai wilayah Indonesia lainnya, sehingga harus diintegrasikan masuk menjadi suatu bagian Indonesia Timur di wilayah Republik Indonesia Serikat (Hardiman, 1995).

Strategi Pihak Belanda

a. Strategi Politik/Diplomasi.

Pihak Belanda berusaha untuk menunda-nunda perundingan dan pembicaraan tentang Irian Barat dengan Indonesia, serta berusaha membatalkan hasil perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 1946, Menteri Jonkmann menyampaikan sikap pemerintah Belanda kepada seluruh anggota parlemen Belanda untuk memasukan klausul tambahan dalam pasal 3 dan 4 perjanjian Linggar Jati tersebut. Pemerintah Belanda memasukan "West New Guinea" masuk kedalam kedudukan susunan baru dan tersendiri dalam Kerajaan Belanda, serta menjajaki kemungkinan pemindahan secara besar-besaran orang Belanda yang berada di Indoneisa untuk pindah ke wilayah Irian Barat. Mengupayakan gagalnya forum pada pembicaraan ditingkat PBB dengan cara melobi sekutu-sekutunya untuk tidak memberikan suara dalam penentuan hasil pendapat sehingga hasil penentuan pendapat tidak memenuhi dua pertiga dari anggota dan dianggap tidak memenuhi kuorum untuk disahkan



sebagai resolusi dari PBB. Belanda membentuk *South Pacific Commission* dan memasukan Irian Barat dalam persetujuan tersebut. Organisasi yang berada di Noumea tersebut, memiliki anggota negara-negara yang banyak berhubungan dengan wilayah yang belum memiliki pemerintahannya sendiri (*non self governing territories*) di wilayah Samudera Pasifik, dan melakukan pembicaraan khusus dengan Australia untuk menjajaki kemungkinan Irian Barat diintegrasikan dengan Federasi Melanesia.

b. Strategi Militer.

Pihak Belanda telah melaksanakan blokade laut dan udara wilayah Irian Barat dengan kapal-kapal patroli, dua buah fregate, dua buah kapal selam dan pesawatintai maritim Neptune. Serta mendatangkan kapal induk Karel Dorman dengan dua buah kapal perusak dan dua buah kapal selam ke kawasan Pasifik dengan formasi siap tempur untuk memperkuat agresi militer Belanda di Irian Barat.

c. Strategi Ekonomi.

Pemerintah Belanda untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Irian Barat, melakukan pembicaraan khusus dengan negara-negara lain semisal: Jerman Barat dan Amerika Serikat, dengan maksud agar ikatan ekonomi ini akan berlanjut dengan kerjasama pertahanan yang menguntungkan pemerintah Belanda dengan alasan melindungi keselamatan objek-objek ekonominya.

Strategi Pihak Indonesia

a. Strategi Politik/Diplomasi.

Pihak Indonesia mendesak Belanda untuk tetap melakukan perundingan dengan Indonesia dan menawarkan konsesi kepada pemerintah Belanda atas hak tambang dan ekonomi lainnya di Irian dengan syarat penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Upaya menaikkan peringkat pembicaraan antara kedua negara dengan membawa masalah ke forum internasional (PBB) dan menggalang dukungan negara lain (negara-negara Asia Afrika) untuk mendukung perjuangan Indonesia, serta mendesak forum PBB untuk mengeluarkan resolusi yang memihak kepada Indonesia. Indonesia selanjutnya mengambil tindakan dan aksi politik/diplomasi (Diamond, 1996), melalui jalan panjang di tiap kabinet, yaitu antara lain:

1. Upaya Politik Kabinet Natsir Tahun 1950.

Kabinet Natsir bertugas di bulan Desember tahun 1950, sebagai suatu tonggak awal perundingan antara pemerintah Belanda dan Indonesia yang akhirnya mengalami jalan buntu (*deadlock*), hal tersebut digunakan pemerintah Belanda sebagai negara agresor terhadap Indonesia untuk memulai gerakan Provokasi serta memperkuat posisinya di Irian Barat. Pada tahun 1952 setelah lahirnya Piagam pengakuan kedaulatan Indonesia, Pemerintah Belanda yang didukung persetujuan anggota parlemennya secara resmi memasukan Irian Barat ke wilayah Kerajaan Belanda dengan cara merubah konstitusi. Aksi tersebut dilakukan Belanda tanpa melakukan pembicaraan dan perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat, dan tidak juga melaksanakan pembicaraan dan perundingan dengan putra putri Indonesia kelahiran Irian Barat.

2. Upaya Politik Kabinet Ali I Tahun 1954.

Upaya Politik Kabinet Ali I bertugas pada masa tahun 1954, apa yang telah dilakukan pada kabinet ini sebagai suatu kelanjutan upaya politik dari kabinet sebelumnya. Tujuannya menarik simpati pihak internasional agar ikut menyelesaikan permasalahan di Irian Barat yang dianggap Belanda menjadi permasalahan internal. Untuk pertama kalinya permasalahan Irian Barat dipaparkan di depan Sidang Umum PBB pada tahun 1954, namun pupus sudah upaya tersebut dan mengalami kegagalan dikarenakan mayoritas anggota yang hadir tidak dapat mencukupi kuota 2/3.

3. Usaha Politik Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun 1955 – 1956.

Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas di periode 12 Agustus 1955 s.d. 3 Maret 1956, kabinet ini memulai perundingan lagi di Sidang Umum PBB ke Sepuluh dan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Kabinet ini mengagendakan pertemuan antara pihak Indonesia dan

Belanda pada tanggal 10 Desember 1955 sampai 11 Pebruari 1956 di Jenewa. Namun pemerintah Belanda memberikan syarat yang berbunyi "*Discussing on certain problems concerning west Irian on the understanding that, with regard the sovereignty each party mainstains its standpoint*" (Membahas masalah-masalah tertentu mengenai Irian Barat dengan pengertian bahwa dalam hal kedaulatan masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya). Indonesia menganggap syarat yang diajukan Belanda terkesan tidak jelas dan mengada-ada, terlihat adanya sifat licik yang ditunjukkan oleh Belanda untuk dapat mempertahankan kekuatan dan posisinya Kerajaan Belanda di wilayah Irian Barat. Kekecewaan muncul di raut muka para delegasi dan rakyat Indonesia yang mengalami perundingan *deadlock*. Pada tanggal 15 Pebruari 1956, Indonesia akhirnya mengambil suatu sikap tegas, dengan membubarkan Unistatus dengan pemerintah Belanda secara unilateral dan tindakan ini dapat memberikan pukulan yang telak pertama terhadap Belanda.

4. Usaha Kabinet Ali II Tahun 1956.

Kabinet Ali II bertugas pada tahun 1956, sebagai kelanjutan dari Kabinet Burhanuddin Harahap yang berakhir sejak tanggal 13 Mei 1956. Kabinet ini mampu memberikan tindakan keras dengan membubarkan seluruh isi perjanjian di KMB, termasuk didalamnya induk dari persetujuan, penyerahan Piagam Kedaulatan, Unistatus, dll sebagainya yang telah diregistrasi terdaftar di Sekretariat PBB nomor 894, tertanggal 14 Agustus 1950. Dengan tidak lagi berdasarkan pada isi induk perjanjian KMB, tindakan yang dilakukan dapat mengemparkan dunia internasional saat itu. Indonesia dalam mempertahankan wilayah Irian Barat berdasar pada semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kedua dasar tersebut menjadi acuan dan perubahan besar dalam arah perjuangan Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi Indonesia tercinta.



Gambar 2. Pembukaan KMB di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949
Sumber: (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016)

Strategi Militer Indonesia.

Pada akhir tahun 1960, Menteri Keamanan Nasional Indonesia Jenderal Abdul Haris Nasution berkunjung ke Uni Soviet dengan tujuan menandatangani persetujuan pembelian peralatan militer senjata dengan proses kredit jangka panjang dan tentunya tidak memberatkan perekonomian Indonesia. Pembelian peralatan militer tersebut (terdiri dari kapal-kapal perang termasuk kapal perusak dan kapal penjelajah RI Irian Jaya, serta pesawat-pesawat tempur seperti mig 17 dan lain-lain) merupakan yang terbesar dalam sejarah pembelian senjata yang dilakukan oleh Indonesia. Bangsa Indonesia melakukan serangkaian operasi militer dengan mengerahkan kampanye militer besar-besaran sebagai upaya untuk menekan pemerintah Belanda agar mau berunding (*Coercive Diplomacy*) (Subandrio, 2001). Operasi militer yang digelar dalam rangka menekan pemerintah Belanda diantaranya adalah :

1. **Operasi Gurita tanggal 28 - 30 Juni 1962**, tugasnya mengadakan pengintaian di perairan Teluk Kaimana untuk mendukung **operasi BADAI LUMUT** yaitu operasi pasukan pendaratan amphi dengan menggunakan Kapal Cepat Torpedo (KCT) yang mampu menahan serangan laut musuh didukung dari unsur Angkatan Laut. Angkatan Udara menyiapkan bantuan

perlengkapan melalui udara dan pada saat pelaksanaan waktu operasi, kekuatan udara mampu memberikan perlindungan udara yang dilaksanakan dengan baik.

2. **Operasi Rajawali tanggal 31 Juli 1962**, memiliki tugas menambah kekuatan pasukan militer beserta dengan *dropping* pengiriman perlengkapan logistik di daerah Kaimana dan Merauke Irian Barat. Sebanyak 71 prajurit militer diterjunkan yang didukung Batalyon Para 328, dan sebanyak 9 Ton perlengkapan logistik dikirimkan ke Merauke.
3. **Operasi Djatayu tanggal 14 Agustus 1962**, yang memiliki misi sama dengan operasi Rajawali, dengan menerjunkan pasukan militer sebanyak 407 prajurit, dengan tujuan misi menambah pasukan militer dan pengiriman perbekalan logistik di daerah Kaimana, Merauke dan Sorong Irian Barat.
4. **Operasi DJAYAWIDJAYA** merupakan puncak operasi terbesar terdiri dari 4 tahap (Soegondo, 19950 yaitu: Operasi **DJAYAWIDJAYA I** dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1962, Angkatan Udara memiliki tugas melaksanakan pemboman dan penembakan dari udara serta menguasai keunggulan di udara dan laut. Angkatan Laut melaksanakan pemburuan bebas (*free hunting*) dan penyerbuan pasukan komandonya. Operasi **DJAYAWIDJAYA II** tanggal 20 Juli 1962 melaksanakan serangan secara vertikal Satuan Tugas 1 dan 2 merebut sasaran wilayah Biak, secara horisontal dilakukan oleh ATA-17 Angkatan Tugas Amphibi (*amphibious*). Operasi **DJAYAWIDJAYA III** tanggal 20 Juli 1962 dilaksanakan Satuan tempur Gatotkaca untuk menguasai sasaran Kotabaru, dan Operasi **DJAYAWIDJAYA IV** tanggal 20 Juli 1962 merupakan operasi lanjutan menguasai Kotabaru yang dilakukan oleh divisi Lesmono.

Menurut *Carl van Clausewitz*, perang merupakan aksi kelanjutan politik dengan menggunakan cara lain, akan tetapi politik atau diplomasi apabila tidak mendapat dukungan dari kekuatan militer akan menjadi sia-sia. Strategi diplomasi merupakan cara yang sangat efektif untuk dapat memenangkan pertempuran tanpa berperang. Namun untuk mendukung operasi tersebut, telah disusun komposisi pasukan Komando Mandala (Abdullah, 2012) antara lain:

1. Bagian Pertahanan Keamanan terdiri dari:
 - a) Komando Daerah Militer wilayah XIII, XIV, XV, XVI, dan Komando Daerah Maritim V, VI, serta Komando Udara II, IV yang didukung masing masing pasukan militernya.
 - b) Brigade Mobil 2 Resimen dan Batalion 508/Brawijaya.
 - c) Armed 2 Batalion
 - d) Arhanud 14 baterai dengan 5 Stasiun Radar.
 - e) Pesawat Udara Mig-17 sebanyak 8 unit dan pesawat AS-4 Gannet 6 unit
2. Bagian pengikat terdiri dari:
 - a) Sebanyak 2000 pasukan gerilya didaratan ke wilayah Irian Barat
 - b) Satu Brigade infanteri, detasemen pelopor Brimob dan 3 kompi satuan Intel.
 - c) Dua kapal MTB dan Satuan Kapal Cepat Torpedo.
3. Bagian penghubung/Lid terdiri dari 6 pesawat udara Albatros, 6 Helikopter, 2 Twin Otter.
4. Bagian pengangkut terdiri dari 20 Dakota, 6 Hercules, dan 26 LST.
5. Bagian Perawatan dan logistik terdiri dari 9 *tanker/salvage* dan 3 kapal rumah sakit
6. Bagian penyerang (*striking force*) terdiri dari:
 - a) 6 buah kapal selam KKS-13 dan 6 buah kapal selam dari KKS-15.
 - b) 20 pembom strategis TU-16 dan TU-16 KS, 6 pembom taktis IL-28, 6 Mustang P-51 dan 6 pesawat B-25 dan B-26.
 - c) 1 kapal komando, 2 kapal perusak, 4 kapal MTB, 4 Korvet, 13 kapal BS dan 4 kapal penyapu ranjau.
 - d) Komando divisi 2 dengan unsur bantuan 1 batalion.
 - e) 2 Brigade Para
 - f) 1 Brigade KKO Pasukan pendarat-45, dibantu Batalion 509/Brawijaya.
 - g) 1 Brigade Cadangan Umum AD.
7. Kesiapan tempur AU terdiri dari KT Parikesit di pangkalan udara Morotai, KT Antareja posisi di Amahai, KT Aswatama posisi di Ambon, KT Wisanggeni posisi di pangkalan udara Letfuan, KT Wesiaji posisi di pangkalan udara Iswahyudi Madiun, serta KT Anggada posisi di pangkalan



udara Halim Jakarta dengan total kekuatan sebanyak 98 buah pesawat udara berbagai jenis 36 buah diantaranya pembom strategis Mig-17, TU-16 dan B-25/26.

8. Pertahanan laut terdiri dari:

- a) Satuan Kapal Cepat Torpedo (KCT-16) terdiri dari 8 kapal KCT Rusia, dan 2 KCT Jaguar untuk silent landing dan 2 kapal tender.
- b) Satuan Kapal Selam (KS-15) sebanyak 4 kapal selam dan 2 kapal tender.
- c) Angkatan Tugas Amphibi (ATA-17) sebanyak 60 buah kapal perang berbagai jenis yang terdiri dari Gugus Tugas Markas, BTK, Tabir, Angkut, Awas, dan Perawatan.
- d) PASRAT-45 sebanyak 8100 pasukan termasuk 1400 diantaranya dari AD.

Dengan kekuatan yang dikerahkan tersebut (70% dari kekuatan angkatan perang Indonesia pada waktu itu) diperkirakan kekuatan pihak Indonesia mencapai 3 (tiga) kali lipat lebih besar dari kekuatan Belanda di Irian Barat. Hal ini merupakan tekanan yang sangat besar bagi Belanda sehingga secara politik harus mengambil langkah diplomasi yang lebih lunak. Hari H yang direncanakan tanggal 12 Agustus 1962 dengan perkiraan seluruh operasi dapat diselesaikan dalam 5 (lima) hari, sehingga tanggal 17 Agustus 1962 peringatan kemerdekaan RI dapat dilaksanakan di Irian Barat. Tetapi Panglima Mandala mengundur hari H menjadi H+14 karena perkembangan situasi politik. Dengan adanya persetujuan dari New York secara formal menghentikan seluruh sengketa antara pemerintah Indonesia dan Belanda tentang pertempuran di wilayah Irian Barat telah ditandatangani tanggal 15 Agustus 1962. Akhirnya di tanggal 16 Agustus 1962, Panglima Tertinggi atau Panglima Besar Pembebasan Irian Barat mengeluarkan perintah penghentian persengketaan antara pemerintah Indonesia dan Belanda.



Gambar 3. Dokumentasi Pengerahan Pasukan Darat, Laut dan Udara
Sumber: Indonesia Defence Magazine, 2022

Strategi Ekonomi Indonesia.

Melaksanakan boikot kegiatan perdagangan dengan Belanda, melakukan pemindahan pusat perdagangan tembakau Indonesia dari Netherland ke Bremen Jerman, dan Nasionalisasi aset-aset ekonomi perusahaan Belanda di Indonesia (Kanumoyoso, 2001). Hasil perampasan 700 perusahaan Belanda ini yang bernilai 1,5 milyar dolar dimasukkan ke kas negara, hal ini juga

membuat kalangan usaha di negeri Belanda ikut berusaha mendesak pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaannya di wilayah Irian Barat ke Indonesia.

Hal-hal Positif dan Negatif bagi Bangsa Indonesia.

1. Hal-hal Positif

- a) Dunia Internasional mendukung perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari penjajahan kolonialisme Belanda. Hal ini dikarenakan sikap pemerintah Indonesia yang tetap mengupayakan cara diplomatis yaitu melalui perundingan dengan pihak Belanda (inisiatif perundingan berada dipihak Indonesia). Hal lainnya adalah kepiawaian pemerintah RI menggalang dukungan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk turut mendukung upaya Indonesia.
- b) Keuletan pemerintah Indonesia untuk berunding dan tarik ulur dalam pembicaraan dengan pihak Belanda didukung dengan gelar kekuatan militer yang besar membuahkan hasil yang positif tanpa harus meletuskan peperangan secara terbuka (Suntzu: Strategi paling baik adalah memenangkan perang tanpa melakukan pertempuran).

2. Hal-hal Negatif

Kenyataan yang diperoleh hasil perjuangan diplomasi pada tanggal 31 Desember 1962, hanya menghasilkan status *de jure* Irian Barat dimana bendera sang merah putih dikibarkan disamping bendera PBB di Irian Barat. Pengamat militer menyatakan bahwa situasi militer sebelum perjanjian New York yang sangat menguntungkan Indonesia dianggap kurang dimanfaatkan untuk mendesak tuntutan-tuntutan diplomasi.

Analisis Aspek Edukatif

1. Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam merebut wilayah Irian Barat tidak terlepas dari berhasilnya diplomasi di tingkat internasional, dengan adanya dukungan dari negara Uni Soviet dan negara-negara Asia Afrika. Peran diplomasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya penggunaan kekuatan militer dan ekonomi.
2. Rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air bagi seluruh warganegara Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang sangat besar dalam upaya mempertahankan kedaulatan di wilayah Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh rakyat Indonesia pada waktu itu yang mendukung penuh perintah Presiden Soekarno dengan TRIKORA-nya dalam rangka memobilisasi umum untuk merebut kembali Irian Barat dari Pemerintah Kerajaan Belanda. Untuk itu, nasionalisme dan rasa cinta tanah air perlu ditanamkan sejak dini kepada seluruh generasi penerus bangsa Indonesia.

Sumber daya manusia dengan profesionalisme yang tinggi dan motivasi yang kuat dan didukung dengan kekuatan militer yang disertai dengan strategi dan taktik yang sesuai dapat mencapai keunggulan di medan pertempuran.

SIMPULAN

Gambaran analisis terkait sikap dan strategi yang diambil mulai dari operasi Trikora-Djaya Wijaya oleh militer yang bersinergi dengan pimpinan politik yakni *lobby* dan diplomasi internasional di KMB hingga melakukan referendum yang di pimpin oleh *United Nations*. dari strategi politik/diplomasi. Hal ini diimplementasikan dengan peningkatan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan mekanisme konsultasi publik. Upaya memperkuat diplomasi/politik hingga saat ini yakni mengajak negara-negara tetangga dan organisasi internasional seperti ASEAN, PIF, dan PBB untuk mendukung memperkuat kedaulatan Indonesia atas Papua. Pendekatan lintas sektoral dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat Papua dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Pada perspektif militer melakukan operasi militer yang intensif dengan tujuan mempertahankan integritas wilayah yang didukung pembangunan infrastruktur militer seperti pangkalan udara, pos militer, dan jaringan komunikasi untuk memperkuat kehadiran militer di Papua. Serta peningkatkan kerja sama dengan negara-negara sekutu dan mitra strategis, terutama dalam hal pengadaan alutsista. Strategi ekonomi yang



diambil oleh pemerintah Indonesia dalam konflik Irian Barat juga termasuk melakukan nasionalisasi aset-aset ekonomi perusahaan Belanda di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes dan tekanan terhadap pemerintah Belanda yang masih mempertahankan klaim atas wilayah Irian Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Lopian, A. B. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah (Jilid 3 Pemikiran dan Institusi Politik Islam)*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2016). *Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949 – 1969*. Jakarta.
- Asmoro, N., Zuhdi, S., & Widodo Putro, R. (2022). Hybrid Threats To Transformation The Doctrine Of Military Campaign Based On Historical Perspective To Achieve Comprehensively National Security. *Journal of Positive School Psychology*, 2022(8), 955–968. Retrieved from <http://journalppw.com>
- Bone, R. C. (1952). *THE DYNAMICS OF THE WESTERN NEW GUINEA (IRIAN BARAT) PROBLEM*. New York.
- Cholil, M. (1971). *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta.
- Departemen Penerangan RI. (1966). *Irian Barat: Keluarga Kesatuan*. Jakarta.
- Diamond, Louise. (1996). *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, Third Edition. Connecticut: Kumarian Press.
- Djamhari, Saleh A., et.al. (1995). *Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Markas Besar ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Hardiman, Sri. (1995). *Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1995.
- Idris, A. M., Thamrin, S., Yoegiantoro, D., & Triprasetyo, R. A. (2022). Kontribusi Pembela Tanah Air (PETA) dalam Pembentukan TNI dengan Pendekatan Historis dan Ilmu Pertahanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 584–593. doi: 10.34007/jehss.v5i1.1256
- Indonesia Defence Magazine, (2022). Mengulik Perjuangan PGT dalam Operasi Serigala di Irian Barat. Diakses pada <https://indonesiadefense.com/mengulik-perjuangan-pgt-dalam-operasi-serigala-di-irian-barat/>
- Kanumoyoso, Bondan. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan.
- Kementerian Penerangan. (1961). *Guide Arsip Pembebasan Irian Barat 1949—1969*. Jakarta.
- Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Editors: Pacific Rim International Journal of Nursing Research. *Pacific Rim Int J Nurs Res*, 16(4).
- Nadjamuddin, L., Akbar, A. A., Perkasa, A., Wargadalem, F. R., & Lumangino, W. D. (2022). Resisting Return to Dutch Colonial Rule: Political Upheaval after Japanese Surrender during the Independence Movement in Sulawesi, Indonesia. *Histories*, 2(4), 426–438. doi: 10.3390/histories2040030
- Prinsen, G., Lafoy, Y., & Migozzi, J. (2017). Showcasing the sovereignty of non-self-governing islands: New Caledonia. *Asia Pacific Viewpoint*, 58(3), 331–346. doi: 10.1111/apv.12151
- Purwanta, H. (2017). Militaristic discourse in secondary education history textbooks during and after the Soeharto era. *Journal of Educational Media, Memory, and Society*, 9(1), 36–53. doi: 10.3167/jemms.2017.090103
- Ridhani, R. (2009). *Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rosyidin, M., Dir, A. A. B., & Wahyudi, F. E. (2022). The Papua Conflict: The Different Perspectives of The Indonesian Government and International Communities—Review from The English School Theory. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 24(2). doi: 10.7454/global.v24i2.1253
- Soegondo, R.M.G., (1995). *Kebenaran tentang Irian Barat*, Jakarta: Pembimbing, 1955.
- Subandrio. (2001). *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaaku.
- Vartasiwi, N. (2018). The politics of history in West Papua - Indonesia conflict. *Asian Journal of Political Science*, 26(1), 141–159. doi: 10.1080/02185377.2018.1445535
- Woodman, C. (2022). The West Papuan liberation movement, Indonesian settler colonialism and Western imperialism from an international solidarity perspective. *The International Journal of Human Rights*, 1-33.

